

PENYIARAN DALAM PEMBANGUNAN NEGARA: ANTARA KEBEBASAN DAN REGULASI

Hamdani M. Syam

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala
Jalan Teuku Nyak Arief, Darussalam, Banda Aceh, Aceh - 23111
hamdanimsyam@unsyiah.ac.id

Abstract

National development can be achieved with good when people want to accept the changes. The change in question here, a change of lifestyle background primitive and backward people who still adheres to the old way of life to the community has advanced by sticking to local social norms. Broadcast media as one of the variables that can create change and development. Many say, the broadcast media has a powerful force in shaping and changing the mindset of the audience. Lerner (1958) says that the broadcast media can develop psychological feelings of human beings who want to know about something that has not been her idea. When he could see the existence of something in the environment of others, it will make a person feel conscious about what you did not exist in their own environment.

Keywords: *Broadcasting, Freedom, Regulation*

Abstrak

Pembangunan negara dapat berlaku dengan baik apabila masyarakat mau menerima perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini, perubahan dari pola hidup yang primitif berlatar belakang masyarakat yang mundur dan masih berpedoman dengan cara lama kepada masyarakat mempunyai pola hidup yang lebih maju dengan tetap berpegang kepada norma-norma sosial setempat. Media Penyiaran sebagai salah satu variabel yang dapat mewujudkan perubahan dan pembangunan negara. Banyak pendapat mengatakan, media penyiaran mempunyai kuasa yang kuat dalam membentuk dan mengubah pemikiran khalayak. Lerner (1958) mengatakan bahwa media penyiaran dapat mengembangkan perasaan psikologi manusia sebagai makhluk yang ingin tahu terhadap sesuatu yang belum dia tahu. Apabila dia dapat melihat kewujudan sesuatu dalam lingkungan orang lain, maka akan membuat seseorang merasa sadar terhadap apa yang belum wujud dalam lingkungannya sendiri.

Kata Kunci: Penyiaran, Kebebasan, Regulasi.

Pendahuluan

Apabila para penganalisis ilmu sosial meneliti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembangunan negara, seringkali media penyiaran dijadikan bahan pembahasan. Banyak para pakar sains sosial mengatakan bahwa media penyiaran sebagai alat pembangunan negara. Sebab media penyiaran sebagai salah satu variabel yang turut bertanggungjawab dalam mengubah corak warna kehidupan sosial. Misalnya, sebagai media literasi, sosialisasi, informasi dan sebagai media pembelajaran lainnya. Media penyiaran mampu berfungsi sebagai alat yang membantu mempercepat proses pembangunan baik dari segi kebendaan maupun moral. Hasil dari penelitian dan penulisan yang telah dibuat selama ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar para pakar bidang ilmu-ilmu sosial mengakui media penyiaran sebagai alat yang mampu mem-

pengaruhi kehidupan sosial. Media penyiaran dapat membantu mereka untuk berubah tingkah laku manusia. Persoalan yang timbul adalah sejauhmanakah peranmedia penyiaran dalam membantu pembangunan suatu negara?

Kemudian pada bagian lain, ada sebagian pendapat dari para sarjana ilmu-ilmu sosial itu menginginkan agar media penyiaran suatu negara perlu kebebasan agar memudahkan dalam mengontrol pemerintah dalam menjalankan pembangunan negara. Apabila ada perbuatan pemerintah yang salah dalam menjalankan pembangunan negara, media penyiaran tidak segan-segan menegur pemerintah melalui pemberitaan. Ada juga sebagian pendapat sarjana ilmu sosial yang menginginkan media penyiaran perlu pengaturan ataupun regulasi agar media penyiaran tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu melalui pemberitaan. Maka itu, tulisan ini ingin

menguraikan sedikit mengenai peran media penyiaran dalam pembangunan negara baik dilihat dari aspek kebebasan maupun dilihat dari aspek regulasi.

Karakteristik Negara Berkembang

Salah satu peristiwa yang amat berarti dalam pertengahan abad ke-20 adalah kemunculan negara-negara berkembang baik di Asia, Afrika, Amerika Latin maupun di bagian-bagian dunia lain. Disebutkan negara berkembang adalah negara bekas jajahan, kebanyakan berada di kawasan benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lahir sebagai negara merdeka setelah Perang Dunia II. Sistem politiknya biasanya mengikut atau meneruskan sistem politik negara penjajah dengan ada sedikit perubahan mengikut kepada sosio-budaya dan ekonomi masyarakat. Namun ada juga di antara negara berkembang melakukan perubahan secara keseluruhan disebabkan oleh sistem politik negara penjajah sudah tidak sesuai dalam konteks masyarakat dan aspirasi perjuangan sebelum kemerdekaan.

Dari segi penduduk, negara berkembang mempunyai masyarakat kurang berminat terhadap membaca disebabkan masih lemah pendidikan yang ada. Diperkirakan hanya 26 persen saja dari jumlah keseluruhan masyarakat yang suka membaca. Dari segi ekonomi mempunyai pendapatan perkapita masih cukup rendah. Bentuk mata pencaharian melalui bertani, nelayan, berkebun dan mempunyai kapasitas pengangguran yang besar (Rachmadi 1990).

Negara berkembang baru dibentuk apabila penduduknya telah mula berubah secara amat kuat daripada masyarakat praindustri kepada masyarakat modern. Ada kalanya masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang ini kelihatannya hampir tidak dapat diselesaikan karena negara-negara ini berusaha dalam jangka masa yang pendek untuk mencapai perubahan dari politik, sosial dan ekonomi. Adakalanya juga, negara berkembang ingin menjadi kepada negara industri. Untuk mencapai status negara industri ini, negara berkembang memerlukan waktu yang cukup lama. Pembangunan seperti ini bukanlah tidak mungkin, tetapi memerlukan kesabaran disebabkan memakan masa yang lama. Namun penerima perubahan sosial dan pembangunan kebangsaan menguraikan masa depan negara-negara berkembang dengan sikap optimis dan terkawal, sebagian besarnya dicirikan kepada peranan yang dimainkan oleh media komunikasi

seperti media penyiaran dalam pembangunan negara.

Latar Belakang Pergerakan Perubahan Sosial

Perubahan adalah satu konsep yang telah dianalisis, dan satu teori yang telah diuji berulang kali sejak zaman Ibnu Khaldun lagi (1331-1406). Melalui bukunya *The Muqaddimah*, beliau telah mengungkapkan beberapa faktor yang terlibat dalam perubahan sosial dengan meneliti pengaruh alam sekitar secara fisik terhadap manusia, bentuk organisasi primitif dan yang maju, hubungan antara organisasi dengan organisasi yang lain, serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat perkotaan dan berbagai fenomena budaya yang lain sehingga Galal (1988) menganggapnya Ibnu Khaldun ini sebagai Bapak Ilmu Sosiologi, dan Lauer (1977) menganggap sebagai pencipta pemikiran sosiologi.

Antara pandangan beliau yang sangat menarik dan berasaskan ialah apabila beliau mengemukakan beberapa konsep struktur masyarakat dan aspek-aspek saling berkaitan diantaranya seperti yang pernah diperdalamkan kemudiannya oleh Comte (1778-1857) dengan konsep organisme masyarakat, Spencer (1820-1903) yang menyebutkan tentang unsur-unsur saling bergantung diantara bagian-bagian dalam masyarakat, Durkheim (1058-1917) dan beberapa penulis lain hingga sekarang ini.

Ibnu Khaldun juga banyak menyentuh mengenai institusi-institusi keluarga, agama dan alam sekitar sebagai satu ikatan yang penting untuk perubahan. Malah beliau adalah antara penulis yang terawal yang mengatakan perubahan juga boleh berlaku sekiranya wujud konflik (Lauer, 1977).

Bertolak dari sinilah penciptaan teori yang lebih mendalam mengenai proses perubahan ini telah dibuat oleh ahli-ahli teori dan falsafah Barat seperti Auguste Comte (1778-1857), Karl Marx (1818-1883), Frederick Engels (1920-1995), Arnold Toynbee (1889-1975), Pitrim A. Sorokin (1889-1968), Max Weber (1864-1920). Pada asasnya aliran pemikiran mereka mengenai perubahan sosial dan ekonomi adalah sama. Apa yang berbeda ialah arah dan bidang sudut pandangan serta pengamatan yang dilakukan.

Pada prinsipnya mereka mengakui bahwa perubahan sosial itu perkara biasa, yaitu ia berlaku mengikut tahap dalam bentuk-bentuk

tertentu disepanjang proses penghidupan itu. Comte telah membagikan tahap perubahan itu kepada tiga: *fictitious* (sesuatu yang tidak jelas), metafisika atau abstrak, dan saintifik atau positif (Lauer, 1977; Etzioni, 1981).

Spencer pula melihat perubahan masyarakat dari sudut yang lain yaitu dari *Homogeneity* ke *Heterogeneity*, di mana beliau coba membedakan di antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern. Walaupun menggunakan nada penekanan dan istilah yang berbeda, Marx dan Engels masih menggunakan pola masyarakat primitif dan kemudiannya feodal sebagai landasan untuk alasan-alasan yang dibuat.

Dengan menggunakan pendekatan *dialectic* sebagai kunci kepada perubahan, Marx menekankan bahwa perubahan berlaku disebabkan wujudnya perbedaan di antara tekanan-tekanan di dalam kehidupan yang berkaitan dengan hasil keluaran yang kemudiannya menimbulkan pertentangan yang dapat dilihat melalui konflik kelas. Konflik dan pertentangan inilah menurut Marx sebagai sumber kepada perubahan dan pembangunan sosial serta ekonomi (Etzioni, 1981).

Konsep dan Teori Perubahan Masyarakat

Masyarakat modern yang wujud pada hari ini di negara-negara Dunia Pertama, Kedua dan kebanyakan Dunia Ketiga bukanlah wujud secara tiba-tiba, 'pembangunan', 'ekonomi', 'teknologi', dan 'sosial' yang dicapai di kebanyakan negara-negara berkenaan bukanlah secara mendadak. Tetapi ia telah melalui berbagai peringkat perubahan, dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metodologi yang telah meninggalkan berbagai bentuk kesan dari berbagai tahap pencapaian (Ponsioen, 1965; Buchanan, 1965).

Kenyataan asas mengenai pergerakan perubahan ini diakui oleh banyak para pakar dalam bidang sosial dan telah dijelaskan dengan terperinci seperti Buchanan (1965), Etzioni (1981), Ian Hogbin (1970) dan Leaur (1977) sebagai contoh. Perbedaan pandangan mengenai pergerakan perubahan sosial ini hanya timbul apabila para pakar tersebut coba melihat metodologi dan pendekatan perubahan serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses perubahan itu.

Pembahasan mengenai metodologi dan pendekatan, serta faktor-faktor perubahan itu menjadi penting karena setiap arah yang diambil

mengenai setiap satu pendekatan dan faktor itu boleh mempengaruhi dan meninggalkan kesan yang berbeda bagi setiap masyarakat yang menganutnya, terutama bagi negara-negara berkembang. Pendekatan media penyiaran sebagai salah satu unsur dalam mewujudkan perubahan sikap. Penelitian mengenai latar belakang perubahan sejagat adalah perlu. Ini adalah karena hakikat perubahan dan modernisasi yang berlaku pada hari ini tidak berlaku secara sendiri. Setiap negara mempengaruhi negara yang lain untuk berubah (Buchanan, 1965).

Kemampuan media penyiaran, terutama televisi dalam mempengaruhi masyarakat telah banyak diteliti. Penelitian-penelitian yang dibuat Berelson, Lazarsfeld, dan McPhee (1954) dan Lerner (1958) diperingkat awal, sehinggalah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Gerbner (1976; 1977; 1978; 1980), Comstock (1981), dan Cox (1988) contohnya. Semuanya menyentuh dalam penelitian mereka mengenai dampak dari media penyiaran dalam perubahan masyarakat, baik dampak itu berlaku secara langsung atau tidak. Peneliti-peneliti tersebut telah meneliti mengenai pengaruh yang ditinggalkan oleh media penyiaran terhadap khalayaknya. Secara umumnya para peneliti di bidang ini mengakui pada satu segi penyiaran ada meninggalkan kesan dalam proses perubahan.

Malah para penulis yang mengulas mengenai pengaruh penyiaran dalam masyarakat seperti Head (1976), Neuman (1981), dan Barbero (1988) contohnya mengaku bahwa wujud pengaruh penyiaran dalam proses perubahan masyarakat. Walau apapun pendekatan dan orientasi penelitian yang digunakan, kebanyakan peneliti lebih memberi fokus kepada pengaruh penyiaran terhadap masyarakat negara-negara maju. Kecuali Lerner (1958) dan beberapa peneliti lain yang meneliti hubungan antara penyiaran dan perubahan masyarakat di negara-negara berkembang. Bagaimanapun, kebanyakan penelitian-penelitian tersebut telah dibuat dalam tahun-tahun 1950an dan 1960-an yang didapati terlalu banyak berlandaskan teori pembangunan yang digagaskan dalam tempoh tersebut.

Usaha-usaha untuk melihat hubungan antara penyiaran dan perubahan masyarakat amat terbatas dilakukan di negara-negara berkembang (Lent, 1987). Walaupun ada dilakukan itupun kebanyakannya dilakukan setelah tahun 1970an (Maslog, 1984). Malah data-data mendasar mengenai pola peliputan penyiaran di kalangan

khalayak pun amat sukar diperolehi di sebagian negara di Asia Pasifik (Sanders, 1981: 197).

Kebanyakan tulisan seperti yang ditulis oleh Mowlana (1986), dan Nawaz (1981) contohnya lebih berbentuk mengulas mengenai hubungan antara penyiaran dengan perubahan sosial. Kebanyakan mereka lebih cenderung mengaku mengenai wujudnya hubungan di antara variabel-variabel yang ada dalam penyiaran dengan proses perubahan sosial, terutama selepas tahun 1972 (Tuchman, 1981). Malah ia hampir menjadi kepercayaan yang universal, terutama di kalangan pemimpin di negara-negara membangun, bahwa penyiaran mampu mempengaruhi proses perubahan masyarakat (Katz dan Wedell, 1977; Hale, 1975; dan Head, 1974).

Hasil desakan kepercayaan yang begitu kuat terhadap perubahan sosial melalui media penyiaran telah menyebabkan beberapa negara membangun melakukan penanaman modal yang tinggi dalam bidang ini. Dengan harapan penyiaran dapat membantu proses pembangunan (Katz dan Wedell, 1977; Head, 1974). Apabila pembangunan tidak dapat dijayakan seperti yang telah dirancang, (Chu, 1987; Lent, 1987) timbul soalan-soalan mengenai mengapa wujudnya keadaan yang sedemikian. Malah terdapat tulisan-tulisan seperti Dahlan (1987) dan Amunugama (1987) misalnya yang berkecenderungan mempersoalkan kemampuan media penyiaran itu.

Oleh karena itu, dengan meninjau semula secara sistematis hubungan antara penyiaran dan perubahan masyarakat, khususnya perubahan sikap masyarakat, kedudukan penyiaran sebagai saluran difusi yang boleh meninggalkan pengaruh yang kuat kepada khalayaknya dapat dinilai semula (Katz, 1973). Sekurang-kurangnya tulisan ini dapat membantu, baik memperkuat kepercayaan yang telah ada, atau mewujudkan rasa kepercayaan yang tinggi dalam membuat spekulasi-spekulasi mengenai kemampuan penyiaran dalam proses perubahan masyarakat, terutama perubahan sikap di kalangan masyarakat di negara-negara berkembang.

Konsep Media Pembangunan

Hachten adalah orang pertama yang membuat konsep media pembangunan, bagi melihat bentuk komunikasi dan arah media di negara-negara sedang berkembang. Malah gagasan ini sebelumnya pernah disponsori oleh UNESCO melalui Schramm (1964) yang berasaskan pada idea Lerner tahun 1958. Setelah

Perang Dunia II, pembangunan menjadi isu besar di kalangan para pemikir media dan komunikasi. Pada tahun 1981, Hachten telah melakukan perubahan terhadap model empat teori media yang telah diajukan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm pada tahun 1956. Dalam buku *The World News Prism* (1981), Hachten mengusulkan tipologi lima konsep. Hachten telah mempertahankan konsep otoritarian dan komunis, menggabungkan libertarian dan tanggungjawab sosial ke dalam konsep Barat, kemudian menambahkan dua teori baru yaitu revolusioner dan pembangunan. Sebagian besar teori yang dikemukakan berkaitan dengan bentuk sistem politik dan ekonomi sesuatu negara. Nampaknya, setiap satu sistem politik di suatu negara mempunyai teori media yang berbeda.

Seiring perjalanan waktu dan perkembangan masa, Hachten (1981) menganggap teori media Siebert, Peterson, dan Schramm dianggap klasik dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman untuk mewakili sistem media negara-negara di dunia. Tambahan pula wujudnya beberapa kritikan oleh beberapa orang sarjana komunikasi yang melihat wujudnya kekurangan dan ketidaksesuaian teori yang telah ada itu untuk mewakili sistem media di dunia.

Menurut Mohd. Safar Hasim (2005), penciptaan sistem media akan senantiasa mengambil kira kepada falsafah dan keperluan negara yang diwakilinya dengan melihat bentuk, warna struktur dan politik di mana ia beroperasi. Ia mencerminkan sistem pengawasan sosial yang mungkin berbentuk undang-undang, politik, ekonomi atau sosial di mana hubungan individu dan negara disesuaikan. Keadaan ini memperjelaskan mengenai sistem media sebuah negara, mungkin sistem tersebut tidak sama dengan negara lain dan perubahan juga berkemungkinan berlaku akibat faktor lingkungan dan persepsi masyarakat dalam menilai permasalahan hidupnya. Begitu juga McQuail (1987) mengemukakan pendapat yang sama, bahwa bentuk teori media massa akan berubah mengikut keadaan masyarakat.

Menurut Mohd. Safar Hasim (2005), sistem media berkaitan dengan sistem politik. Media dalam negara Dunia Ketiga atau negara-negara berkembang seperti yang diperkatakan oleh Hachten (1981) sering dianggap mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan negara. Dalam sistem pemerintahan yang begitu bebas sekalipun media terpaksa

untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dengan begitu wujud pengawasan terhadap media demi menjaga ketenteraman negara. Pengawasan ini selalu terjadi, kadang-kadang terjadi perubahan-perubahan terhadap sistem pengawasan ini, dari pengawasan yang sepenuhnya (*authoritarianisme*), berubah kepada pengawasan yang agak longgar (*libetarianisme*). Hachten (1981), tidak mempercayai dengan sistem media yang menganut kebebasan mutlak. Ia mengatakan, bahwa kebebasan mutlak itu adalah satu dongengan. Menurut Merrill (1974), ada hubungan intim antara pemerintah dengan media massa. Kedua-duanya saling perlu memerlukan. Merrill (1974) mengakui media massa dan pembangunan negara mempunyai hubungan simbiotik yang penting. Begitu juga Ichlasul Amal (2000), mengatakan bahwa dalam negara berkembang kebebasan media secara mutlak dapat membawa masyarakat pada situasi anarkis (*lawless*).

Adapun prinsip-prinsip media pembangunan yang disampaikan oleh McQuail (1987) ialah:

1. Media harus menerima dan melaksanakan tugas pembangunan sejajar dengan falsafah kebangsaan.
2. Kebebasan media hendaklah terbuka kepada pengawasan berdasarkan kepada kepentingan ekonomi dan pembangunan masyarakat.
3. Media harus memberikan keutamaan dari segi isi terhadap budaya dan bahasa nasional.
4. Demi kepentingan pembangunan, negara mempunyai hak untuk campur tangan dalam operasi media, termasuk melarang untuk diberitakan, dan subsidi pemerintah.

Dikatakan pula oleh McQuail (1987), di negara sedang berkembang, fungsi terpenting media adalah menyebarkan dan menafsirkan berita kepada masyarakat. Sedangkan mengenai hubungan media dengan pemerintah di negara sedang berkembang adalah berbeda mengenai hubungan media dengan pemerintah di negara Barat. Media di negara berkembang biasanya mempertahankan ideologi dan sistem politik pemerintah yang sudah ada.

Rachmadi (1990) menguraikan sistem media negara sedang berkembang sebagai berikut:

1. Sistem media cenderung mengikuti sistem media negara bekas penjajahnya.

2. Media di negara berkembang berada dalam bentuk transisi. Ia masih berusaha mencari bentuk yang tepat atau mencari identitas sendiri. Maka media negara berkembang masih dalam taraf transisi. Biasanya media negara berkembang mempunyai bentuk kurang stabil.
3. Negara berkembang pada umumnya masih berada pada tahap sedang menjalankan pembangunan. Hal ini menyebabkan media dalam negara tersebut dituntut untuk mempunyai peranan sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*), di mana media bersama-sama pemerintah mempunyai tanggungjawab atas keberhasilan pembangunan.
4. Secara umum kebebasan media di negara berkembang diakui ada, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat batasan-batasan, kerana media dituntut untuk ikut menjamin atau mengusahakan stabilitas politik dan ikutserta dalam pembangunan ekonomi.
5. Sistem dan pola hubungan antara media massa dengan pemerintah mempunyai tendensi perpaduan antara sistem-sistem yang ada (*libertarian, authoritarian, social responsibilty*, dan sebagainya).

Di kebanyakan negara berkembang, media mengamalkan konsep pembangunan sebagaimana yang telah digariskan oleh UNESCO dalam satu forum mengenai konsep pembangunan negara diantaranya, ialah:

1. Semua alat komunikasi massa seperti surat khabar, radio, televisi, film, dan pelbagai alat komunikasi lainnya hendaklah digerakkan oleh pemerintah untuk membantu usaha pembangunan negara, menghapus buta huruf dan kemiskinan, membina kesadaran politik, membantu pembangunan ekonomi.
2. Media seharusnya bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam proses mempercepat pembangunan negara, bukan melawannya.

Di negara-negara berkembang, media massa dapat memberikan sumbangannya yang cukup besar sebagai alat perubahan sosial dalam usaha pembangunan bangsa. Media massa mengemban fungsi pendukung kemajuan dan meningkatkan kehidupan masyarakat kepada arah yang lebih baik. Media hadir di tengah-tengah masyarakat kerana keberadaannya diperlukan oleh masyarakat. Schramm (1977) menyatakan bahwa media merupakan buku harian tercetak bagi manusia. Media massa sebagai sumber informasi

yang terperinci dan interpretasi tentang masalah-masalah umum. Supaya media dapat memberi sumbangan yang lebih banyak kepada program pembangunan negara, pemberita harus membedakan cara penyampaian berita-berita kriminal, politik, dengan berita hiburan.

Penyiaran di Negara Berkembang

Perkembangan dan pembentukan sistem penyiaran di negara-negara di dunia, peneliti-peneliti seperti Coddington, Jr (1959), Head (1974; 1976; 1985; 1987), dan Katz dan Wedell (1977), mereka mengaitkan sumber pergerakan perkembangan dan proses perwujudan sistem penyiaran di negara-negara di dunia dengan alam sekitarnya. Keadaan alam sekitar penyiaran yang paling sering diperkatakan ialah yang berkaitan dengan Perang Dunia I dan II. Ini disebabkan bahwa setelah Perang Dunia I, penyiaran telah diperkenalkan secara hampir luas sekali ke seluruh negara di dunia. Penyiaran yang pertama sekali wujud pada masa itu melalui penyiaran radio.

Berdasarkan teori yang dibuat oleh para sarjana seperti Katz & Wedell (1977), Head (1974), Coddington, Jr (1959), Paulu (1956) dan Lent (1978), salah satu faktor utama wujud penyiaran radio pada negara-negara berkembang karena pengaruh penjajahan. Penelitian yang dilakukan oleh Lent (1978), terhadap penyiaran di negara-negara Dunia Ketiga, telah memberi empat gambaran berikut; *pertama*, sebagian besar negara-negara di Dunia Ketiga telah diperkenalkan dengan penyiaran radio melalui gerakan penjajahan. *Kedua*, sistem penyiaran yang dibentuk sewaktu negara-negara berkenaan masih dijajah ialah sistem yang dimodelkan dari negara-negara yang menjajah itu sendiri. *Ketiga*, sistem penyiaran di negara-negara yang dijajah ini berubah atau disesuaikan daripada model yang diperkenalkan oleh kuasa penjajah kepada sistem tersendiri baik dalam konteks sistem politik maupun sistem sosial negara setempat. *Keempat*, kajian-kajian yang dilakukan oleh sarjana-sarjana tersebut dapat disimpulkan juga bahwa pola perkembangan penyiaran di antara sebuah negara dengan negara lain tidak seragam, walaupun telah melalui proses pengenalan dan pembentukan sistem penyiaran yang sama.

Kesedaran tentang gambaran yang keempat itulah yang menyebabkan Head (1976 dan 1985) dan Howell Jr. (1986) membuat kesimpulan bahwa pengaruh keadaan politik dan

sosio-budaya di dalam sesebuah negara memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perkembangan penyiaran radio dalam negara tersebut. Head (1974), telah menyadari keadaan ini sejak awal tahun 1970 melalui hasil penelitian yang dijalankan bersama kawan-kawan di negara-negara benua Afrika. Malah faktor-faktor keadaan inilah, terutama keadaan politik, yang menyebabkan wujudnya perbedaan di antara satu sistem penyiaran dengan sistem penyiaran yang lain.

Tabel 1 berikut ini, sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Katz dan Wedell (1977), mengenai pembentukan penyiaran di negara-negara Dunia Ketiga. Beliau mengatakan bahwa wujudnya kuasa penjajah terhadap pembentukan penyiaran kepada negara Dunia Ketiga. Dari 91 negara yang dilakukan penelitian, 26 negara terpengaruh oleh kuasa Inggris, dan selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat dan Perancis masing-masing sebanyak 21 negara, Belgia 3 negara dan Spanyol, Selandia Baru masing-masing 1 negara dan yang menganut sistem campuran sebanyak 17 negara.

Tabel 1
Model Penyiaran di Negara Dunia Ketiga

Model	Jumlah Negara Dunia Ketiga
Inggris	26
Amerika Serikat	21
Perancis	21
Belgia	3
Spanyol	1
Selandia Baru	1
Belanda	1
Model Campuran	17
	91

Sumber: Katz dan Wedell, 1977

Negara Inggris merupakan negara yang paling banyak menerapkan model penyiarannya di negara-negara Dunia Ketiga, selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat dan Perancis. Perubahan model penyiaran dari negara maju ke negara sedang membangun telah membawa perubahan terhadap; norma-norma, peraturan-peraturan yang bertulis, cara penerbitan, nilai, profesionalitas serta kepercayaan dan sikap. Perubahan ini berlaku melalui latihan, sosialisasi secara tidak langsung ia berfungsi sebagai pengimpor struktur, teknologi dan isi yang ditampilkan oleh penyiaran yang bersumber dari negara-negara maju (Katz dan Wedell, 1977).

Di Malaysia, pemilikan penyiaran radio dan sistem penngelolaan telah dilakukan sendiri

oleh Inggris kira-kira 10 tahun sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 (Asiah Sarji, 1995). Bagi Katz dan Wedell (1977), keadaan ini tidak mengherankan karena hampir semua negara yang sedang membangun di dunia yang pernah dijajah oleh kerajaan Inggris telah menerima secara menyeluruh corak sistem penyiaran yang dibawa oleh Inggris atau corak penyiaran seperti BBC.

Para sarjana penyiaran meramalkan bahwa perkembangan penyiaran radio yang berlaku sebelum Perang Dunia ke II itu banyak disebabkan oleh perkembangan keadaan politik, yaitu memang wujud hubungan erat antara penyiaran dengan keadaan politik, ekonomi dan sosio-budaya tempat ia wujud.

Satu penelitian yang dilakukan Johari Achee (2000) mengenai penyiaran di negara Brunei Darussalam. Keadaan rakyat Brunei Darussalam sebelum Inggris memberikan kemerdekaan penuh pada 1984, sebahagian besar penduduk Brunei adalah buta huruf, sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui media cetak tidak dapat memberi mamfaat apa-apa kepada masyarakatnya. Maka pemerintah Brunei berkeinginan untuk mendirikan station radio pada tanggal 2 Mei 1957. Tujuannya adalah supaya dapat membantu menyebarkan berita-berita penting dari pemerintah kepada rakyatnya. Sedang penyiaran televisi dilancarkan dengan resminya pada tanggal 9 Juli 1975, kira-kira 18 tahun selepas radio Brunei mula disiarkan.

Padahal keputusan untuk menghidupkan penyiaran televisi telah pun diluluskan pada akhir tahun 1960-an, tetapi dibiarkan begitu saja selama beberapa tahun. Apa yang mencetuskan keputusan untuk menghidupkan semula penyiaran tersebut ialah disebabkan kemasukan siaran televisi Malaysia ke Brunei. Siaran televisi Malaysia itu dikhawatirkan oleh pemerintah Brunei terhadap kesan dan pengaruh kepada rakyatnya. Pada tahun 1960 sampai akhir 1962, keadaan dua negara ini dari segi politik mengalami keadaan yang tidak menentu. Pembentukan Malaysia yang mengabungkan Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura menyebabkan konfrontasi di antara Malaysia yang baru dibentuk dengan Indonesia. Karena Indonesia tidak setuju menggabungkan Sabah dan Serawak ke dalam negara Malaysia. Keadaan politik yang tidak baik telah menyebabkan pemerintah Brunei untuk mengadakan institusi media kebangsaan dan pada masa yang sama

menghalangkan siaran media asing masuk ke negara Brunei. Asiah Sarji (1995), apabila sebuah negara berada dalam keadaan yang terancam, maka selagi itulah pembentukan dan pengembangan penyiaran dilakukan lebih berhati-hati berbanding dengan negara-negara yang keadaan sosio-budaya, ekonomi dan politiknya yang tenang.

Asiah Sarji (1995) telah pun membuat penelitian mengenai penyiaran radio di Malaysia antara tahun 1920 sampai 1959. Beliau juga mendapati bahwa penyiaran radio di Malaysia sama seperti kebanyakan negara yang dijajah oleh Inggris. Proses perkembangan penyiaran radio dilakukan secara sangat hati-hati. Faktor yang jelas berlaku pada waktu itu mengapa kerajaan Inggris bersikap terlalu berhati-hati karena Inggris sedang berada diambang pergelutan politik dan ekonomi dunia sangat kacau. Dengan jumlah tanah jajahannya yang luas, dan tahun 1930-an pula, ia dihadapkan kepada pintu berperangan di Eropah, dan Asia Timur ia berhadapan dengan desakan kuasa Jepang yang mula mengembangkan sayapnya ke negara-negara di Asia. Pada masa yang sama, mereka mengetahui bahwa pengaruh komunis Cina dan Soviet sedang mula menular ke Asia Tenggara dan India Selatan.

Karthigesu (1994) telah membuat kajian mengenai sejarah perkembangan televisi di Malaysia. Menerangkan bahwa pada awal berdiri televisi di Malaysia mempunyai lima tujuan utama. *Pertama*, menerangkan secara mendalam dasar, undang-undang dan kebijakan pemerintah kepada rakyatnya. *Kedua*, menggalakkan perhatian rakyat dan cara berfikir untuk melahirkan perubahan-perubahan sikap yang sejajar dengan kehendak-kehendak dan kebijakan-kebijakan pemerintah. *Ketiga*, membantu lahirnya kesadaran masyarakat dan menggalakkan perkembangan seni dan kebudayaan Malaysia. *Keempat*, mengadakan bahan yang sesuai untuk ilmu pengetahuan umum, penerangan umum dan hiburan. *Kelima*, membantu mewujudkan persatuan dan kesatuan kebangsaan melalui Bahasa Malaysia dan membentuk satu kebudayaan nasional di kalangan masyarakat berbeda-beda dari segi kepercayaan, agama dan kebudayaan.

Setelah kemerdekaan pada tahun 1957, penyiaran Malaysia dikembangkan selain penyiaran radio kepada penyiaran televisi digabungkan ke dalam Radio Televisyen Malaysia

(RTM) di bawah pengendalian pemerintah. Setelah kemerdekaan, tujuan penyiaran untuk menerangkan kebijakan pemerintah dengan mengadakan liputan yang seluas-luasnya bagi membolehkan rakyat memahami dengan tepat terhadap kebijakan tersebut. Dan tidak juga meninggal pola hiburan melalui drama, musik dan sebagainya supaya tidak ditinggalkan oleh rakyat untuk menonton yang disiarkan. Oleh karena itu, sekiranya diambil penemuan Karthigesu (1994), Asiah Sarji (1995), Head (1976 dan 1985), Howell Jr. (1986), McQuail (2002), dan Merrill (2000), dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial budaya, ekonomi dan politik dalam suatu negara akan mempengaruhi corak terhadap bentuk sistem penyiaran di negara tersebut.

Dari ketiga-tiga aspek tersebut, aspek keadaan politik yang paling sering diberi analisis yang mendalam. Coddington Jr (1959), Paulu (1959) dan Briggs (1961) adalah di antara sarjana yang paling awal yang telah membuat penelitian tentang penyiaran dengan masyarakat walaupun tidak menggunakan unsur-unsur keadaan penyiaran sebagai bahan penelitian. Secara tidak langsung, para sarjana penyiaran ini telah mengatakan bagaimana perubahan yang berlaku dari keadaan politik dan sosial budaya, mampu mengubah bentuk dan arah perkembangan sistem penyiaran.

Bagaimana Head (1974; 1976; 1985), Katz dan Wedell (1977), dan Howell (1986), dalam penelitian-penelitian mereka tentang perkembangan penyiaran dan pembentukan sistem penyiaran di negara-negara yang mereka teliti, telah member fokus yang lebih khusus tentang hubungan keadaan politik dan sosial budaya dan keadaan-keadaan alam sekitar yang lain dengan sistem penyiaran. Walaupun perhatian khusus telah diberi terhadap bagaimana perkembangan dan pembentukan sistem penyiaran radio sangat berkaitan dengan keadaan alam sekitarnya, namun penelitian yang dibuat, tidak menunjukkan dengan jelas bagaimana hubungan tersebut wujud.

Kebebasan dan Regulasi

Media penyiaran sama seperti media massa lain pada umumnya, yaitu dapat memainkan peranan penting dalam menstrukturkan pandangan khalayak. Faridah Ibrahim (2009) mengatakan kebanyakan khalayak perlu bergantung kepada media massa untuk memahami keadaan sekelilingnya. Dengan ini

menjadikan kekuasaan berada pada tangan organisasi media untuk menentukan apa yang harus diterima oleh khalayak. Dalam hubungan ini, media boleh dikatakan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kognisi seseorang. Berbagai kejadian dan peristiwa yang terjadi di setiap pelosok dunia diberitakan oleh media massa baik itu media cetak maupun elektronik, senantiasa dinanti-nantikan oleh khalayak yang ingin tahu apa yang sedang terjadi di sekeliling mereka.

Menurut Singleraty dalam Faridah Ibrahim (2009), masyarakat memandang bahwa berita yang dihasilkan melalui media massa adalah sebuah kebenaran. Masyarakat umum cenderung menerimanya tanpa banyak mempersoalkan tentang penilaian dan pemilihan berita, penonjolan berita serta pemilihan istilah dan bahasa yang digunakan di dalam pemberitaan. Secara khusus, McQuail (1987) mengatakan, media massa merupakan alat untuk mensosialisasikan dan menentukan agenda pemerintah untuk rakyatnya. Ini juga pernah diutarakan oleh Cohen (1963) yang mensponsori *Agenda Setting Theory*. Katanya, walaupun media massa tidak mampu menentukan bagaimana sesuatu itu dipikirkan oleh khalayak, tetapi media massa mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang harus dipikirkan oleh khalayak.

Dengan melihat faktor kekuatan yang dimiliki oleh media penyiaran dengan media lain pada umumnya yaitu mampu mempengaruhi pemikiran khalayak. Apakah media penyiaran harus diberi kebebasan, menyiarkan apa saja yang dikehendaki oleh si pemilik media ini? Atau apakah ia harus mendapat regulasi dari pemerintah untuk mengatur agar tidak terlalu bebas?

Kebebasan ini harus dilihat dari perspektif yang lebih luas supaya tidak mengaburkan arti kebebasan itu sendiri. Persoalan yang perlu ditanyakan di sini, kebebasan untuk apa? Kebebasan daripada siapa? Apakah ia satu kebebasan untuk berbuat apa saja? Adakah kebebasan ini terlepas dari kontrol pemerintah semata-mata? Atau adakah ia satu kebebasan untuk melariskan penjualan media dari masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar?

Pandangan ini tentunya sangat subjektif dalam memaknakan maksud kebebasan itu sendiri. Sebab setiap negara ada pemahaman

tersendiri terhadap kebebasan ini. Itu berkaitan dengan falsafah atau ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Menurut Mohd. Safar Hasim (2004), falsafah atau ideologi suatu negara tidak terbentuk secara vakum atau kekosongan, ia perlu disesuaikan dengan sistem lain yang ada dalam negara tersebut, diantaranya adalah dengan sistem politik, budaya dan agama. Apabila corak kebebasan media tertentu bisa dijalankan di negara Indonesia, mungkin belum tentu bisa digunakan di negara lain. Misalnya saja dalam mengartikan bentuk pornografi yang disiarkan melalui siaran televisi, tentunya berbeda sekali penilaian masyarakat negara Barat yang non muslim dengan penilaian negara yang pola hidup masyarakatnya lebih kepada ideologi Islam khususnya Indonesia.

Menurut Mahathir Mohamad dalam Mohd. Safar Hasim (2004), sewaktu Mahathir masih menjadi Perdana Menteri Malaysia mempunyai pandangan mengenai kebebasan media termasuk media penyiaran. Mahathir menolak pendapat pihak yang mengatakan jika media dalam pemberitaan banyak memuji pekerjaan pemerintah dikatakan bahwa media yang demikian adalah tidak bebas. Sebaliknya, jika media itu menentang pemerintah ia dianggap sebagai media bebas, walaupun ia menentang karena takut kepada pihak-pihak tertentu di luar pemerintah, atau takut karena tidak populer atau siaran televisinya tidak laris menjualkan iklan. Kata Mahathir, sebenarnya media seperti ini juga tidak bebas. Media yang bebas, menurut Mahathir, bukan berarti media itu hanya bebas untuk mengkritik dan memberitakan suka hati mengenai kerja pemerintah, tetapi juga bebas untuk memuji kerja baik yang telah dilakukan pemerintah.

Sebenarnya, masalah kebebasan media sudah banyak dibahas sejak berabad-abad yang lalu dan jawabannya pun bermacam-macam. Ia boleh dirumuskan kepada beberapa aliran pemikiran. Ada yang menghendaki kebebasan itu tanpa kontrol dari pemerintah. Ia boleh menyiarkan berita apa saja seperti yang terangkum dalam teori libertarian. Ada yang menginginkan media dikontrol oleh pemerintah seperti dalam teori authoritarian. Ada juga yang menginginkan ia bebas, tapi dengan sedikit kontrol dari pemerintah seperti dalam teori tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hakikat kebebasan media itu sebenarnya adalah tidak ada di negara manapun di dunia, baik negara liberal

atau negara diktator, hanya saja tergantung kepada tingkatan kebebasan itu sendiri, ada kebebasan secara mutlak dan ada juga yang sedikit bebas.

Di negara liberal, semua pemberitaan dalam media massa dikuasai oleh orang-orang tertentu yang berkuasa dalam media berkenaan. Mungkin orang ini adalah pemilik media, redaktur, pengarang berita, perusahaan yang membeli ruang iklan. Di sini mereka dapat menentukan isi pemberitaan dalam suatu media massa, dan mereka juga boleh membuat pemberitaan sesuka hati mereka. Media massa dalam hal ini, tidak hanya dilihat sekedar tempat penyiaran berita semata-mata atau tempat penyampaian pendapat saja, tapi dapat juga dilihat sebagai komoditas perdagangan untuk mencari keuntungan. Para redaktur mungkin berpikir beberapa kali untuk menyiarkan berita pihak-pihak tertentu yang membawa implikasi negatif jika media massa itu bergantung keuangannya pada pihak tersebut, atau mungkin saja memilih untuk tidak menyiarkan pihak-pihak tertentu. Dengan begitu, bukan pemerintah saja yang dapat menentukan isi sebuah media, tapi pemilik media, redaktur, wartawan, kepentingan keuangan, dorongan popularitas, semua ini dapat menentukan kebebasan media itu sendiri (Mohd. Safar Hasim, 2004).

Di sini perlu dicermati adalah aturan atau regulasi terhadap sistem kebebasan media. Itu penting untuk dilakukan supaya ia tidak terlalu keblablasan. Sebab media dapat juga digunakan untuk mencapai keamanan dan bisa juga digunakan menghancurkan sesuatu bangsa. Walaupun lembaga PBB melalui UNESCO telah mengatakan, bahwa kebebasan media sebagai Hak Asasi Manusia yang perlu diwujudkan oleh setiap negara. Tapi menurut penulis, setiap kebebasan yang dijalankan hendaklah disertai dengan sikap hormat dan taat kepada undang-undang yang berlaku tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Selain itu, kebebasan media perlu digunakan dan dinikmati dengan rasa tanggung jawab. Kebebasan tidak harus meruntuhkan nilai-nilai kesopanan, ketertiban dan juga tidak sampai menghilangkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa.

Mohd. Safar Hasim (2004), telah mengibaratkan media massa termasuk media penyiaran, seperti sungai yang bebas mengalir bersimpang siur menuju muara, tentulah indah apabila dipandang mata. Begitu juga media massa

yang bebas untuk bertindak sendirian tentulah baik bagi aliran pemikiran tertentu. Sungai membawa banyak kebaikan kepada manusia. Ia dapat menjadi sumber makanan, minuman, pengangkutan dan dapat juga dijadikan tempat untuk bersukaria. Begitu juga media, banyak juga memberi manfaat bagi manusia. Sungai dapat dicemari dengan sampah busuk, begitu juga media dapat dicemari dengan berbagai bahan yang tidak diinginkan. Adakalanya sungai dapat membawa bencana banjir, begitu juga media massa boleh membawa bencana kepada negara jika ia secara terus menerus menyiarkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sungai boleh dibendung agar airnya tidak terlalu liar dan deras dengan cara membuat irigasi, walaupun begitu ia tetap bebas mengalir sesuai irigasi yang telah dibuat. Media penyiaran juga boleh dibendung melalui peraturan atau undang-undang agar ia lebih bertanggung jawab, tanpa menghilangkan semangat kebebasan itu sendiri.

Menurut Feintuck (1998), adalah media penyiaran sifatnya tidak bebas. Feintuck (1998), telah meneliti mengenai pembentukan sistem penyiaran dari aspek pengaturan. Mengatakan, media penyiaran seperti televisi memerlukan regulasi dalam melakukan siaran. Menurut Feintuck (1998), ada tiga aspek mengapa media penyiaran perlu mendapat pengaturan.

Pertama, sebab media penyiaran menggunakan gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik ini sangat terbatas. Persoalan ini membuat pemerintah atau lembaga yang telah diberikan hak oleh pemerintah untuk terlibat dalam membuat pengaturan mengenai siapa yang berhak memiliki dan menggunakan gelombang elektromagnetik, dan siapa yang tidak berhak. Di sini pemerintah dianggap sebagai pihak yang mengontrol dan mengatur media penyiaran. Apabila masalah ini tidak diatur ia akan terjadi tumpang-tindih dalam penggunaan frekuensi. Feintuck (1998) mencontohkan, apabila pada waktu bersamaan terdapat dua orang atau banyak orang yang berbicara, maka akan mencapai kegagalan dalam melakukan komunikasi.

Kedua adalah terhadap negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Media penyiaran sebagai alat untuk memperkuat pemerintahan demokrasi. Sebab salah satu ciri utama yang diperlukan dalam negara demokrasi

adalah adanya sesuatu yang menjamin keberagaman politik dan kebudayaan. Dengan demikian, dalam konteks media penyiaran, ada hak seseorang individu untuk tidak menerima tayangan-tayangan tertentu. Persoalan ini sama seperti ada hak negara untuk tidak menerima tayangan-tayangan televisi yang penuh dengan unsur seksualitas dan kekerasan. Misalnya, tayangan seks bertentangan dengan budaya masyarakat negara tertentu, terutama negara-negara yang mayoritas rakyatnya menganut agama Islam.

Ketiga adalah alasan ekonomi. Dalam masalah ekonomi ini, apabila media penyiaran tidak diatur atau ia diberikan kebebasan, maka akan dimonopoli oleh kaum kapitalis. Kalau begini, akan menghancurkan ekonomi negara yang bersifat kerakyatan. Sebab alasan itu, Feintuck (1998) mengatakan, penyiaran ini diperlukan pengaturan supaya ia tidak bebas untuk merebut hak orang lain.

Dari pendapat Feintuck (1998) tersebut, dapat dilihat bahwa regulasi terhadap sistem penyiaran adalah wajib diperlukan dalam suatu negara. Walaupun negara itu mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi, disebabkan oleh keunikan pada media penyiaran ini. Sifat media penyiaran itu sendiri dalam melaksanakan siarannya harus menggunakan gelombang elektromagnetik. Agar ia tidak terjadi tumpang-tindih siaran dengan siaran penyiaran lain, maka ia perlu pengaturan, regulasi ataupun undang-undang dalam mengatur masalah ini.

Penutup

Penyiaran merupakan penemuan teknologi dalam bidang elektromagnetik yang ditemukan pada abad ke-19, telah digunakan secara meluas di negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam rangka perubahan masyarakat untuk pembangunan negara. Media penyiaran adalah radio dan televisi mempunyai peran utama dalam mempercepat proses modernisasi dan pembangunan suatu negara. Media radio dan televisi merupakan alat penyampai informasi dari pihak perancang pembangunan (pemerintah) kepada pihak yang menerima pembangunan (masyarakat). Dengan begitu, hubungan media penyiaran dengan pemerintah sangat penting sekali supaya informasi yang disampaikan oleh pemerintah akan terus sampai kepada masyarakat.

Media penyiaran juga dapat mengatasi masalah jarak geografis dan buta huruf karena kebolehan mejangkau lautan dan gunung untuk menemui berjuta orang secara cepat. Sejak penciptaan dan perluasan penggunaan media penyiaran ini, ia sering dijadikan bahan penelitian kepada berlakunya perubahan. Penelitian mengenai perubahan sosial yang telah dijalan selama ini, telah menunjukkan kecenderungan yang tinggi di kalangan para peneliti untuk mengakui bahwa terdapat hubungan yang berarti di antara perubahan sosial dengan penyiaran. Malah berlakunya pembentukan dan perkembangan sistem penyiaran di negara-negara yang sedang membangun dipertengahan kurun ke-20 adalah manifestasi kepercayaan para pemimpin di negara-negara berkenaan terhadap penyiaran. Media penyiaran telah memberi harapan supaya dapat membantu proses perubahan masyarakat di negara-negara tersebut.

Bagi negara yang sedang melakukan tahap pembangunan, pengaturan terhadap media penting dilakukan agar media itu tidak keblablasan. Media pembangunan harus memilih berita pembangunan yang memenuhi tiga fungsi utama yaitu menyampaikan informasi yang sesuai dengan masalah dan keperluan masyarakat, memotivasikan masyarakat agar mau mencapai tujuan tertentu, mendidik masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Peran media penyiaran dalam pembangunan negara adalah sebagai alat untuk mensosialisasikan dan menentukan agenda pemerintah bagi rakyatnya. Media ini sering kali menjadi alat untuk membentuk agenda sosial di dalam suatu negara. Di negara Barat, media penyiaran telah bermula sebagai satu inovasi teknologi dan kemudian secara perlahan-lahan menjadi satu fenomena penting dalam kehidupan sosial dan bernegara. Media penyiaran saja merupakan satu alat teknologi yang membawa bahan hiburan, tetapi ia membawa juga pesan sosial yang terjalin di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Asiah Sarji. (1995). Pengaruh persekitaran politik dan sosio-budaya terhadap pembangunan radio Malaya di antara tahun 1920-1959. *Disertasi Doktor Falsafah*. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Barbero, J., M. (1988). *Communication from culture: the crisis of national and the emergence of the popular*. Dalam Media, Culture and Society. 10, p. 447-465.
- Berelson, B., Lazarsfeld, P., F., dan McPhee. (1954). *Voting: a study of opinion formation in a presidential campaign*. Chicago: University of Chicago Press.
- Cohen, B. (1963). *The Press and Foreign Policy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Faridah Ibrahim. (2009). Etika Kewartawanan dan Pengalaman dalam Konteks Islam. Dalam. Mohd. Safar Hasim dan Zulkiple Abd. Ghani (Editor). *Komunikasi di Malaysia: Suatu Penelitian Awal, Pendekatan Islam Hadhari*, Hal: 151-165. Bangi: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Feintuck, M. (1998). *Media Regulation, Public Interest and Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Hachten, W., A. (1981). *The World News Prism: Changing Media, Clashing Ideologies*. Ames: The Iowa State University Press.
- Head, S., W. (1976). *Broadcasting in America: A Survey of Television and radio*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Head, S., W. (1974). *Broadcasting in Africa: a continental survey of radio and television*. Philadelphia: Temple University Press.
- Howell, W., J. (1986). *World broadcasting in the age of the satellite: comparative systems, policies and issues in mass telecommunication*. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.
- Ibnu Khaldun. (1980). *The muqaddimah: an introduction to history*. Vol. 1. New York: Princeton University Press.
- Ichlasul Amal. (2000). Kebebasan Pers Dihadang Kekerasan Massa. *Kompas-cetak*. Edisi 13 Juni 20104. Diakses dari: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0010/02/nasional/kebe07.htm> (13 Juni 2004).

- Jeffres, L., W. (1986). *Mass media processes and effects*. Illinois: Waveland Press Inc.
- Johari Achee. (2000). *Berita televisyen dan pembangunan negara: kajian kes radio televisyen Brunei*. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.
- Katz, E. (1973). The diffusion of new ideas and practices, reflections on research. Dalam. *Voice of America: Mass Communication*, p. 51-61. Washington, D.C: United International Information Agency.
- Katz, E & Wedell, G. (1977). *Broadcasting in the third world: promise and performance*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Lent, J., A. (1978). *Broadcasting in Asia and Pacific: a continental survey of radio and television*. Philadelphia: Temple University Press.
- Lerner, D. (1958). *The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East*. New York: The Free Press.
- McQuail, D. (1987). *Mass Communication Theory: an Introduction*, (Eds ke2). London: Sage Publications.
- Merrill, J., C. (1974). *The Imperative of Freedom*. New York: Hastings House.
- Mohd. Safar Hasim. (2005). Media Globalization: Towards greater Freedom or Responsibility. *Malaysian Journal of Communication*, 21, Hal: 109-119.
- Mohd. Safar Hasim. (2004). *Akbbar di Malaysia: Antara Kebebasan Dengan Tanggungjawab Sosial*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia Press.
- Mowlana, H. (1986). *Global information and world communication new frontiers in international relations*. New York: Longman Inc.
- Rachmadi, F. (1990). *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: PT Gramedia.
- Schramm, W. (1977). *The Process and Effects of Mass Communications*. Urbana: University of Illinois Press.